

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### **Buku:**

- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Anwar, Syarifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Djohansjah, J. *Reformasi Mahkamah Agung: Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2008.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

- Indonesia Corruption Watch. *Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014.
- Lumbuun, Ronald S. *PERMA RI: Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sunarto. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1990.
- Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajagrafindo Perkasa, 2018.

#### **Karya Ilmiah:**

- Adonara, Firman Floranta. “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 12 No. 2 (2015).
- Fahmiron, “Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Litigasi* 17 No.2 (2016).
- Suherman, Andi. “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman.” *SIGn Jurnal Hukum* 1 No. 1 (2019).

#### **Website:**

- Putra, Nanda Perdana. “Vonis Seumur Hidup Kasus Jiwasraya Dinilai Tingkatkan Kepercayaan Publik” Media Online Liputan 6 Accessed February 9, 2021.

<https://liputan6.com/news/read/4412065/vonis-seumur-hidup-kasus-jiwasraya-dinilai-tingkatkan-kepercayaan-publik> akses 9 Februari 2021

Ramadhan, Ardito. "MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman." Media Online Kompas Accessed November 28, 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/18081581/ma-terbitkan-peraturan-soal-pemidanaan-koruptor-icw-harap-jadi-jawaban>

Sidik, Syahrizal. "Ketok Palu, Ini Vonis Lengkap 6 Terdakwa Kasus Jiwasraya" Media Online CNBC Indonesia Accessed February 9, 2021.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20201027095538-17-197347/ketok-palu-ini-vonis-lengkap-6-terdakwa-kasus-jiwasraya>

Susanto, Vendy Yhulia. "MA terbitkan Perma 1/2020, ICW: Hakim yang tidak mengikuti harus ada sanksi." Media Online Kontan Accessed October 9, 2020.

<https://nasional.kontan.co.id/news/ma-terbitkan-perma-12020-icw-hakim-yang-tidak-mengikuti-harus-ada-sanksi>